



# Framing Kebangsaan Melalui Dakwah Kultural: Strategi Komunikasi Politik Kh. Abdullah Syafi'ie

Ihsan Abdul Haq<sup>1</sup>, Edison Bonar Tua Hutapea<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

## Article Info

### Article History

Submitted 15-02-2026

Revised 18-13-2026

Accepted 20-04-2026

Published 30-05-2026

### Keywords:

Political  
Communication,  
Framing,  
National  
Consciousness,  
Religious Preaching by  
Clerics

### Correspondence:

[Ihsanelhaq12@gmail.com](mailto:Ihsanelhaq12@gmail.com)

## Abstract

*Strengthening national consciousness faces increasingly complex challenges due to globalization, identity politics, and information disruption in the digital age. These conditions call for a model of political communication capable of contextualizing national values through an approach that is closely attuned to the social realities of the community. This study aims to analyze national framing through cultural da'wah (preaching) implemented by K.H. Abdullah Syafi'ie as a political communication strategy in building national consciousness. The method used is qualitative research with a descriptive-interpretive approach through discourse analysis of K.H. Abdullah Syafi'ie's sermons, da'wah practices, and thoughts within a socio-religious context. The results of the study indicate that K.H. Abdullah Syafi'ie frames national consciousness through Islamic values such as amanah, ukhuwah, unity, and the common good, which are communicated through a cultural da'wah approach using symbolic and cultural language that resonates with the community. This framing produces a national identity that is inclusive, religious, and adaptive to social dynamics. The novelty of this study lies in the integration of the framing perspective into the study of political communication and cultural da'wah to explain the formation of national consciousness at the grassroots level. The findings of this study suggest that cultural da'wah can serve as an effective instrument of political communication in strengthening social cohesion and national resilience amid the challenges of the digital age.*

Penguatan kesadaran kebangsaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat globalisasi, politik identitas, dan disrupsi informasi pada era digital. Kondisi ini menuntut model komunikasi politik yang mampu membingkai nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual melalui pendekatan yang dekat dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing kebangsaan melalui dakwah kultural yang diterapkan K.H. Abdullah Syafi'ie sebagai strategi komunikasi politik dalam membangun kesadaran kebangsaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif melalui analisis wacana terhadap ceramah, praktik dakwah, dan pemikiran K.H. Abdullah Syafi'ie dalam konteks sosial-keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Abdullah Syafi'ie membingkai kesadaran kebangsaan melalui nilai-nilai keislaman seperti amanah, ukhuwah, persatuan, dan kemaslahatan yang dikomunikasikan melalui pendekatan dakwah kultural dengan bahasa simbolik dan kultural yang dekat dengan masyarakat. Framing tersebut menghasilkan konstruksi kebangsaan yang inklusif, religius, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi



perspektif framing dalam kajian komunikasi politik dan dakwah kultural untuk menjelaskan pembentukan kesadaran kebangsaan di tingkat akar rumput. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa dakwah kultural dapat berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik yang efektif dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan nasional di tengah tantangan era digital.

---

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan kesadaran kebangsaan di Indonesia dalam era kontemporer menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan percepatan globalisasi dan revolusi teknologi digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga memengaruhi cara individu dan kelompok memaknai identitas kebangsaan. Kehadiran media digital sebagai ruang publik baru telah memperluas akses informasi sekaligus membuka peluang munculnya disinformasi, polarisasi, dan fragmentasi sosial. Dalam konteks ini, kesadaran kebangsaan tidak lagi bersifat statis atau diwariskan secara linear, melainkan terbentuk melalui proses komunikasi yang dinamis dan terus-menerus (Couldry & Hepp, 2017).

Kesadaran kebangsaan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses komunikasi, internalisasi nilai, dan interaksi simbolik dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif komunikasi politik, pembentukan kesadaran kebangsaan tidak hanya berlangsung melalui institusi negara, tetapi juga melalui aktor-aktor sosial yang memiliki legitimasi kultural dan moral di tengah masyarakat. Salah satu mekanisme penting dalam proses tersebut adalah framing, yaitu proses pemilihan, penonjolan, dan penafsiran aspek tertentu dari realitas sosial sehingga membentuk cara masyarakat memahami suatu isu (Entman, 1993). Melalui framing, nilai-nilai kebangsaan dapat dikonstruksi dalam narasi yang relevan dengan identitas, budaya, dan keyakinan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, dakwah memiliki posisi strategis sebagai medium komunikasi politik yang mampu membingkai nilai-nilai kebangsaan melalui pendekatan keagamaan. Muhammad Natsir dalam *Fiqhud Dakwah* menjelaskan bahwa dakwah bukan sekadar aktivitas penyampaian ajaran agama, melainkan proses transformasi sosial yang bertujuan membentuk masyarakat yang berakhlak, berkeadilan, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama (Natsir, 2008). Menurut Natsir, keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh kemampuan da'i memahami kondisi sosial masyarakat dan menyampaikan pesan secara bijaksana sesuai konteks yang dihadapi. Perspektif ini menunjukkan bahwa dakwah memiliki fungsi komunikasi yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial dan kebangsaan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemikiran Natsir memberikan landasan bahwa framing kebangsaan dapat dilakukan melalui dakwah yang mengintegrasikan nilai keislaman dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Konsep hubungan antara Islam dan kebangsaan dijelaskan secara lebih eksplisit oleh Said Aqil Sirodj dalam *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokrasi Kaum Santri*. Sirodj menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan persatuan masyarakat (Sirodj, 2015). Islam kebangsaan dipahami sebagai paradigma yang menempatkan nilai-nilai keislaman dalam kerangka kehidupan berbangsa yang plural dan demokratis. Dari perspektif framing, pemikiran ini menunjukkan bahwa pesan kebangsaan dapat dikonstruksi melalui nilai-nilai Islam yang inklusif sehingga mampu diterima oleh masyarakat yang beragam. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana K.H. Abdullah Syafi'ie membingkai nasionalisme sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam, bukan sebagai identitas yang terpisah dari agama.

Pemikiran Ahmad Hassan dalam *Islam dan Kebangsaan* juga memberikan dasar konseptual mengenai relasi antara identitas keagamaan dan identitas nasional. Hassan berpendapat bahwa kecintaan terhadap tanah air dan keterlibatan dalam kehidupan berbangsa merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Hassan, 1984). Menurutnya, Islam tidak menolak konsep kebangsaan, tetapi mengarahkan kebangsaan agar berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa nasionalisme dapat dibangun melalui nilai-nilai keagamaan yang mendorong solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif. Dalam penelitian ini, perspektif Hassan membantu menjelaskan bagaimana dakwah dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada ajaran Islam.

Dari sudut pandang metodologi dakwah, Sayyid Qutb dalam *Fiqih Dakwah* menekankan pentingnya memahami kondisi sosial, psikologis, dan budaya masyarakat dalam menyampaikan pesan dakwah (Qutb, 2001). Dakwah tidak cukup dilakukan melalui penyampaian doktrin secara normatif, tetapi harus mampu membangun kesadaran dan perubahan sosial melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Pemikiran ini memiliki kesesuaian dengan teori framing yang menekankan pentingnya konstruksi makna dalam proses komunikasi. Pesan yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda tergantung pada cara pesan tersebut

dibingkai dan dikomunikasikan. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie dapat dipahami sebagai proses framing yang memanfaatkan pendekatan dakwah untuk membentuk kesadaran kebangsaan masyarakat.

Sementara itu, Syaikh Amin Ash-Shiddiqi dalam *Manhaj Dakwah dalam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa keberhasilan dakwah bertumpu pada penerapan prinsip hikmah, mau'izhah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan sebagaimana diajarkan Al-Qur'an (Ash-Shiddiqi, 2007). Prinsip hikmah menekankan kebijaksanaan dalam memahami kondisi masyarakat, mau'izhah hasanah menekankan pendekatan persuasif yang menyentuh aspek moral, sedangkan mujadalah billati hiya ahsan menekankan dialog yang santun dan argumentatif. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa dakwah pada hakikatnya merupakan proses komunikasi yang berorientasi pada pembentukan pemahaman dan perubahan perilaku sosial. Dalam konteks kebangsaan, pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sosial dibingkai secara kultural sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah kultural berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik yang efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan. Dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membingkai realitas sosial melalui narasi, simbol, dan nilai yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kerangka teoretis ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana K.H. Abdullah Syafi'ie menggunakan strategi komunikasi politik melalui dakwah kultural dalam membingkai kesadaran kebangsaan, sehingga nilai-nilai Islam seperti ukhuwah, amanah, persatuan, dan kemaslahatan dapat diinternalisasi sebagai bagian dari identitas kebangsaan masyarakat.

Salah satu tokoh ulama yang memiliki kontribusi penting dalam konteks ini adalah K.H. Abdullah Syafi'ie. Sebagai ulama Betawi yang aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah, beliau dikenal mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Pendekatan komunikasi yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, dengan memanfaatkan bahasa kultural yang dekat dengan masyarakat. Praktik dakwah yang dilakukan mencerminkan adanya strategi framing yang mengaitkan ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya berlangsung dalam arena formal, tetapi juga dalam ruang-ruang kultural dan religius. Aktivitas seperti pengajian, khutbah, ceramah, serta pendidikan berbasis pesantren dan madrasah dapat menjadi medium komunikasi politik yang efektif dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Dalam konteks ini, framing yang digunakan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam hal bagaimana nilai-nilai kebangsaan dikonstruksi dan dikomunikasikan melalui pendekatan dakwah.

Penelitian mengenai hubungan Islam, ulama, dan kebangsaan di Indonesia telah berkembang cukup luas. Hefner (2011) menunjukkan bahwa aktor-aktor Islam memainkan peran penting dalam penguatan demokrasi dan pluralisme di Indonesia, sementara Kersten (2015) menjelaskan kontribusi pemikiran Islam kontemporer dalam membentuk wacana kebangsaan yang inklusif. Di sisi lain, sejumlah penelitian juga menyoroti peran ulama sebagai agen perubahan sosial dan mediator nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan publik. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada dimensi teologis, sosial, dan politik Islam pada tingkat konseptual, sementara aspek komunikasi yang menjelaskan bagaimana pesan-pesan kebangsaan dikonstruksi, dibingkai (framed), dan disebarluaskan melalui praktik dakwah ulama masih relatif kurang mendapat perhatian. Secara khusus, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif komunikasi politik, teori framing, dan dakwah kultural untuk menjelaskan proses pembentukan kesadaran kebangsaan di tingkat akar rumput. Kesenjangan ini menjadi penting mengingat keberhasilan penyebaran nilai-nilai kebangsaan tidak hanya ditentukan oleh substansi pesan, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun makna dan penerimaan masyarakat terhadap pesan tersebut.

Dalam konteks tersebut, K.H. Abdullah Syafi'ie menjadi kasus yang relevan untuk dikaji karena beliau tidak hanya dikenal sebagai ulama dan pendidik, tetapi juga sebagai tokoh yang secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, pendidikan, dan kebangsaan dalam aktivitas dakwahnya. Pengaruhnya yang kuat di kalangan masyarakat perkotaan Jakarta serta pendekatan dakwah yang dekat dengan realitas sosial menjadikan K.H. Abdullah Syafi'ie sebagai representasi penting dari praktik dakwah kultural yang berorientasi pada pembentukan kesadaran sosial dan kebangsaan. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie membingkai (frame) kesadaran kebangsaan melalui dakwah kultural, dan bagaimana konstruksi

makna kebangsaan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat? Pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan kajian komunikasi politik dan dakwah, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai peran ulama dalam membangun kesadaran kebangsaan melalui pendekatan komunikasi yang berbasis nilai-nilai religius dan kultural.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie dalam membingkai kesadaran kebangsaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses komunikasi dan makna yang dihasilkan. Fokus penelitian tidak hanya pada isi pesan, tetapi juga pada strategi penyampaian, konteks sosial, serta respons audiens terhadap pesan tersebut.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi antara teori komunikasi politik, konsep framing, dan praktik dakwah ulama dalam konteks pembentukan kesadaran kebangsaan. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat dikomunikasikan secara efektif melalui jalur kultural dan religius. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan era digital.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh berbagai data dan fakta mengenai meningkatnya polarisasi sosial di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa media sosial sering kali menjadi ruang yang memperkuat segregasi opini dan mempersempit ruang dialog (Lim, 2017). Selain itu, survei nasional tentang literasi digital menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memilah informasi masih tergolong rendah, sehingga rentan terhadap manipulasi informasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun kesadaran kritis dan solidaritas sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie dalam membingkai kesadaran kebangsaan, serta mengapa strategi tersebut efektif dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan religius. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk framing yang digunakan, mengidentifikasi nilai-nilai yang dikomunikasikan, serta memahami mekanisme komunikasi yang mendukung efektivitas pesan tersebut.

Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek utama. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi politik dengan memasukkan perspektif keagamaan dan budaya lokal sebagai elemen penting dalam pembentukan kesadaran kebangsaan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi komunikasi, pendidik, dan tokoh agama dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan kontekstual dalam memperkuat kohesi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa tantangan kebangsaan di era digital memerlukan pendekatan komunikasi yang inovatif dan kontekstual. Dalam hal ini, praktik komunikasi yang dilakukan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie menawarkan model alternatif yang relevan untuk dikaji, terutama dalam upaya membangun kesadaran kebangsaan yang inklusif, berakar pada nilai religius, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

## **B. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk memahami bagaimana K.H. Abdullah Syafi'ie membingkai kesadaran kebangsaan melalui dakwah kultural sebagai strategi komunikasi politik. Paradigma konstruktivis dipilih karena memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi, bahasa, simbol, dan praktik komunikasi dalam konteks sosial tertentu. Dalam penelitian ini, kesadaran kebangsaan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibangun melalui narasi, nilai, dan pesan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi tokoh (biographical-intellectual study), bukan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemikiran, strategi komunikasi, dan praktik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie sebagai seorang ulama yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Studi tokoh memungkinkan peneliti menganalisis gagasan, karya, aktivitas dakwah, serta konteks sosial-historis yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran tokoh yang diteliti.

Mengingat K.H. Abdullah Syafi'ie wafat pada tahun 1985, penelitian ini tidak melakukan wawancara terhadap subjek utama. Oleh karena itu, sumber data primer diperoleh dari dokumen historis yang merepresentasikan pemikiran dan aktivitas beliau, seperti teks ceramah, pidato, tulisan, arsip lembaga pendidikan yang didirikannya, dokumentasi organisasi, serta publikasi yang memuat gagasan dan

aktivitas dakwahnya. Data tersebut dilengkapi dengan sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, biografi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dakwah, komunikasi politik, dan kebangsaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara terbatas kepada informan pendukung yang memiliki kedekatan historis dan pengetahuan mengenai pemikiran K.H. Abdullah Syafi'ie, seperti keluarga, murid, pengelola lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat yang pernah berinteraksi dengan beliau. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria pengalaman, keterlibatan, dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan bukan untuk merekonstruksi fakta sejarah secara tunggal, melainkan untuk memperkaya interpretasi terhadap dokumen dan konteks sosial yang melingkupi aktivitas dakwah tokoh.

Analisis data menggunakan model framing Robert Entman yang meliputi empat elemen utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pesan-pesan kebangsaan dikonstruksi dalam ceramah, tulisan, dan aktivitas dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie. Selain itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai kebangsaan, dakwah kultural, persatuan, ukhuwah, dan kemaslahatan sosial. Proses analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang.

Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari dokumen historis, arsip kelembagaan, literatur biografis, dan keterangan informan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi analisis dokumen dan wawancara pendukung. Langkah ini bertujuan meningkatkan validitas interpretasi dan memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber data. Dengan desain tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie dalam membingkai kesadaran kebangsaan melalui dakwah kultural.

## **C. HASIL & PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie dalam membingkai kesadaran kebangsaan memiliki karakter yang khas, yaitu integratif, kultural, dan berbasis nilai-nilai keislaman yang kontekstual. Temuan ini diperoleh melalui analisis terhadap praktik dakwah, pendidikan, serta narasi yang berkembang di lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Dalam konteks ini, kesadaran kebangsaan tidak dibangun melalui pendekatan formal atau struktural semata, melainkan melalui proses komunikasi yang berlangsung secara organik dalam kehidupan masyarakat.

Temuan pertama menunjukkan bahwa konstruksi kesadaran kebangsaan yang dikembangkan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie berangkat dari paradigma religius yang menempatkan kebangsaan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Narasi yang disampaikan tidak memisahkan antara identitas keislaman dan identitas kebangsaan, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka nilai yang saling menguatkan. Dalam berbagai praktik komunikasi, pesan kebangsaan dikaitkan dengan konsep-konsep Islam seperti amanah, ukhuwah, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa framing yang digunakan bersifat normatif-religius, namun tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Al-Qaradawi (2010) yang menegaskan bahwa loyalitas terhadap negara (*hubbul wathan*) dapat menjadi bagian dari ekspresi keimanan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks lokal, penelitian oleh Azra (2017) juga menunjukkan bahwa ulama Indonesia memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nasionalisme melalui pendekatan dakwah yang moderat dan inklusif.

Temuan kedua menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan bersifat kultural dan kontekstual. K.H. Abdullah Syafi'ie menggunakan bahasa yang sederhana, simbol-simbol lokal, serta pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini memungkinkan pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat awam. Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Betawi dan pendekatan kekeluargaan menjadi salah satu ciri khas komunikasi beliau yang memperkuat kedekatan emosional dengan audiens.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep dakwah kultural yang menekankan pentingnya adaptasi pesan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat (Arifin, 2018). Dalam perspektif pemikiran Timur Tengah, Al-Bayanuni (2013) juga menekankan bahwa keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh kemampuan da'i dalam memahami kondisi sosial audiens dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan realitas mereka.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa medium komunikasi yang digunakan tidak terbatas pada ceramah atau khutbah, tetapi juga mencakup lembaga pendidikan, interaksi sosial, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie menjadi ruang strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Dalam proses pendidikan tersebut, nilai-nilai keislaman dan kebangsaan diajarkan secara simultan, sehingga membentuk karakter peserta didik yang memiliki kesadaran kolektif terhadap pentingnya persatuan dan tanggung jawab sosial.

Temuan ini didukung oleh penelitian lokal yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki peran strategis dalam membentuk identitas kebangsaan yang inklusif (Sirozi, 2017). Dalam konteks Timur Tengah, Al-Attas (2014) menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk adab dan kesadaran sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Temuan keempat menunjukkan bahwa efektivitas strategi komunikasi K.H. Abdullah Syafi'ie sangat dipengaruhi oleh kredibilitas personal sebagai ulama. Kepercayaan masyarakat terhadap beliau menjadi faktor utama yang memperkuat penerimaan terhadap pesan yang disampaikan. Kredibilitas ini dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata, tetapi juga melalui keteladanan yang memberikan pengaruh yang lebih mendalam.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Hidayat (2019) yang menunjukkan bahwa kredibilitas ulama merupakan faktor kunci dalam keberhasilan komunikasi dakwah di masyarakat. Dalam literatur Timur Tengah, Al-Ghazali (2011) juga menekankan bahwa efektivitas dakwah sangat bergantung pada integritas moral dan keteladanan seorang da'i, karena masyarakat cenderung lebih mudah menerima pesan dari figur yang memiliki legitimasi etis.

Temuan kelima menunjukkan adanya pola framing yang konsisten dalam membingkai kesadaran kebangsaan. Pertama, kebangsaan dibingkai sebagai amanah keagamaan yang harus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat Islam. Kedua, kebangsaan dibingkai sebagai kebutuhan sosial yang penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat yang plural. Ketiga, kebangsaan dibingkai sebagai warisan sejarah perjuangan yang harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Pola framing ini menunjukkan bahwa pesan kebangsaan tidak disampaikan secara tunggal, tetapi melalui berbagai perspektif yang saling melengkapi.

Dalam konteks ini, temuan penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa framing berbasis nilai keagamaan memiliki efektivitas yang tinggi dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Sementara itu, dalam perspektif Timur Tengah, Abu Zahrah (2012) menegaskan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi pembentukan solidaritas sosial yang dapat menjadi dasar bagi terbentuknya kesadaran kolektif, termasuk dalam konteks kebangsaan.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap strategi komunikasi tersebut cenderung positif. Masyarakat tidak hanya memahami pesan kebangsaan secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikannya dalam bentuk sikap dan perilaku sosial. Hal ini terlihat dari meningkatnya solidaritas antar kelompok, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai persatuan. Proses internalisasi ini terjadi secara bertahap melalui interaksi yang berulang dalam kegiatan dakwah dan pendidikan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas strategi komunikasi tersebut menghadapi tantangan dalam konteks kekinian, terutama akibat perubahan pola komunikasi yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Masyarakat saat ini lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial, yang sering kali menyajikan narasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam situasi ini, pendekatan komunikasi yang berbasis interaksi langsung menghadapi keterbatasan dalam menjangkau audiens yang lebih luas.

Temuan ini didukung oleh penelitian lokal yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor yang memperkuat penyebaran informasi yang menyesatkan (Nasrullah, 2018). Dalam konteks Timur Tengah, penelitian oleh Al-Saggaf (2017) juga menunjukkan bahwa media digital dapat

menjadi ruang yang memperkuat polarisasi jika tidak diimbangi dengan pendekatan komunikasi yang adaptif.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan keterbatasan dalam ketersediaan data tertulis mengenai praktik komunikasi K.H. Abdullah Syafi'ie. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara dan ingatan kolektif masyarakat, yang berpotensi mengandung bias subjektif. Hal ini menjadi salah satu keterbatasan yang memengaruhi kedalaman analisis, terutama dalam merekonstruksi secara utuh strategi komunikasi yang digunakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie dalam membingkai kesadaran kebangsaan memiliki karakter yang unik dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Pendekatan yang integratif antara nilai agama dan kebangsaan, penggunaan strategi komunikasi kultural, serta dukungan kredibilitas personal menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan komunikasi tersebut.

## **Pembahasan**

### **1. Konstruksi Kesadaran Kebangsaan Berbasis Nilai Keislaman**

Pembahasan ini menegaskan bahwa konstruksi kesadaran kebangsaan yang dikembangkan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie tidak berdiri dalam dikotomi antara agama dan negara, melainkan dibangun melalui integrasi nilai-nilai keislaman dengan identitas kebangsaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa narasi kebangsaan yang disampaikan tidak bersifat sekuler, tetapi justru berakar pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang diterjemahkan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Kebangsaan diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat Islam, sehingga membangun negara dan menjaga persatuan dipahami sebagai bagian dari ibadah sosial.

Dalam perspektif teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan konstruktivisme sosial dalam komunikasi, yang menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi simbolik dan produksi makna (Couldry & Hepp, 2017). Dalam konteks ini, K.H. Abdullah Syafi'ie berperan sebagai aktor yang memproduksi makna kebangsaan melalui bahasa agama yang memiliki legitimasi kuat di masyarakat. Proses ini tidak hanya menghasilkan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran afektif dan normatif yang mendorong keterlibatan sosial.

Dalam wawancara dengan K.H. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i Putra sekaligus penerus beliau yang memimpin Perguruan Islam As-Syafiiyah dan aktif dalam gerakan dakwah nasional, diperoleh keterangan bahwa dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie tidak hanya berorientasi pada penguatan pemahaman keagamaan, tetapi juga pada pembentukan tanggung jawab sosial dan kebangsaan masyarakat. Menurut beliau, nilai-nilai seperti ukhuwah, amanah, dan persatuan selalu menjadi bagian penting dalam pesan dakwah yang disampaikan K.H. Abdullah Syafi'ie.

K.H. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i menjelaskan: "K.H. Abdullah Syafi'ie selalu menekankan bahwa menjadi Muslim yang baik tidak cukup hanya dengan menjalankan ibadah secara pribadi, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat, menjaga persatuan, dan mencintai tanah air. Menurut beliau, menjaga keutuhan bangsa merupakan bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, dakwah yang beliau sampaikan selalu mengajarkan ukhuwah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial sebagai wujud nyata pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa framing kebangsaan yang dibangun K.H. Abdullah Syafi'ie tidak diposisikan sebagai wacana politik yang terpisah dari agama, melainkan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing kebangsaan yang digunakan bertumpu pada konsep-konsep utama dalam Islam, seperti amanah (tanggung jawab), ukhuwah (persaudaraan), dan kemaslahatan (kebaikan bersama). Ketiga konsep ini menjadi landasan dalam menyampaikan pesan bahwa menjaga persatuan bangsa merupakan kewajiban kolektif yang memiliki dimensi spiritual. Dengan demikian, kebangsaan tidak hanya dipahami sebagai konstruksi politik, tetapi juga sebagai bagian dari etika keagamaan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Hasan (2018) yang menunjukkan bahwa diskursus Islam di Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan nasionalisme melalui pendekatan moderat dan inklusif. Selain itu, studi oleh Hosen (2019) juga menegaskan bahwa konsep "hubbul wathan minal iman" sering digunakan dalam konteks dakwah untuk menguatkan legitimasi religius terhadap nasionalisme di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara Islam dan kebangsaan bukanlah fenomena baru, tetapi telah menjadi bagian dari tradisi intelektual dan praksis sosial ulama Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi kesadaran kebangsaan berbasis nilai keislaman dilakukan melalui proses internalisasi yang berlangsung secara bertahap. Proses ini terjadi melalui interaksi yang berulang dalam kegiatan dakwah, pendidikan, dan kehidupan sosial. Dalam setiap interaksi tersebut, pesan kebangsaan disampaikan secara implisit maupun eksplisit, sehingga membentuk pola pikir dan sikap masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai persatuan.

Dalam konteks teori komunikasi, proses ini dapat dipahami melalui konsep internalisasi nilai yang menekankan bahwa pesan yang disampaikan secara konsisten dan kontekstual akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh audiens (Waisbord, 2018). K.H. Abdullah Syafi'ie tidak hanya menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga melalui praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, sehingga memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan.

Temuan lain menunjukkan bahwa integrasi antara identitas religius dan nasional dilakukan tanpa menimbulkan konflik identitas. Sebaliknya, kedua identitas tersebut saling memperkuat dan membentuk kesadaran kolektif yang inklusif. Hal ini terlihat dari cara beliau menyampaikan pesan yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan, menjaga harmoni sosial, serta menghindari konflik yang dapat merusak persatuan bangsa.

Penelitian oleh Menchik (2019) menunjukkan bahwa Islam di Indonesia memiliki karakter "toleransi tanpa liberalisme", di mana nilai-nilai keagamaan digunakan untuk mendukung kohesi sosial tanpa harus mengadopsi paradigma sekularisme Barat. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian ini, di mana nilai keislaman digunakan sebagai basis untuk membangun kesadaran kebangsaan yang inklusif dan kontekstual.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa agama dalam membingkai kebangsaan memiliki keunggulan dalam membangun legitimasi moral. Dalam masyarakat yang religius, pesan yang disampaikan dengan menggunakan referensi agama cenderung lebih mudah diterima dan dipercaya. Hal ini memperkuat temuan penelitian oleh Arifianto (2020) yang menyatakan bahwa otoritas religius memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik di Indonesia, terutama dalam isu-isu sosial dan politik.

Konstruksi kesadaran kebangsaan berbasis nilai keislaman juga terlihat dalam cara beliau menempatkan negara sebagai ruang untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Negara tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari agama, tetapi

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan moral dalam Islam. Dengan demikian, loyalitas terhadap negara tidak bertentangan dengan keimanan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer, hal ini sejalan dengan konsep maqasid al-shariah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum sebagai tujuan utama syariat (Auda, 2018). Dalam konteks ini, menjaga persatuan dan stabilitas negara dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi kesadaran kebangsaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praksis. Nilai-nilai yang disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, solidaritas antar kelompok, serta komitmen terhadap nilai-nilai persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan tidak hanya efektif dalam membentuk pemahaman, tetapi juga dalam mendorong perubahan perilaku.

Temuan ini didukung oleh penelitian oleh Rahman (2021) yang menunjukkan bahwa komunikasi dakwah yang berbasis nilai memiliki potensi besar dalam membentuk perilaku sosial masyarakat, terutama disampaikan melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Hal ini memperkuat argumen bahwa komunikasi politik berbasis nilai keagamaan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa konstruksi kesadaran kebangsaan berbasis nilai keislaman menghadapi tantangan dalam konteks modern, terutama akibat perubahan pola komunikasi yang dipengaruhi oleh digitalisasi. Generasi muda yang lebih banyak mengakses informasi melalui media digital cenderung memiliki pola pemaknaan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini menuntut adanya adaptasi dalam strategi komunikasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian oleh Lim (2017) menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang yang memperkuat polarisasi jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Dalam konteks ini, konstruksi kesadaran kebangsaan berbasis nilai keislaman perlu dikembangkan dengan memanfaatkan media digital sebagai saluran komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa konstruksi kesadaran kebangsaan berbasis nilai keislaman yang dilakukan oleh K.H. Abdullah

Syafi'ie memiliki karakter yang integratif, kontekstual, dan berbasis pada legitimasi moral. Integrasi antara identitas religius dan nasional menjadi faktor kunci dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat yang inklusif dan berorientasi pada persatuan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana komunikasi politik berbasis nilai keagamaan dapat digunakan sebagai strategi dalam membangun kohesi sosial di masyarakat yang plural.

## **2. Strategi Framing dalam Komunikasi Politik Dakwah**

Pembahasan ini menitikberatkan pada bagaimana pola framing digunakan dalam komunikasi politik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie untuk membingkai kesadaran kebangsaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi framing yang digunakan tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional, yaitu dengan menempatkan kebangsaan sebagai amanah keagamaan, kebutuhan sosial, dan warisan sejarah perjuangan. Ketiga bingkai ini bekerja secara simultan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap makna kebangsaan, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga diterima secara emosional dan normatif.

Dalam perspektif teori framing, Entman (1993) menjelaskan bahwa framing berfungsi untuk mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi. Dalam konteks penelitian ini, K.H. Abdullah Syafi'ie secara konsisten menggunakan struktur framing tersebut dalam dakwahnya. Kebangsaan didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dijaga (*define problem*), perpecahan diposisikan sebagai ancaman (*diagnose causes*), persatuan dinilai sebagai kewajiban moral (*moral judgment*), dan partisipasi sosial menjadi solusi (*treatment recommendation*). Pola ini menunjukkan bahwa framing yang digunakan memiliki struktur yang sistematis dan terarah.

Analisis framing dalam penelitian ini dilakukan terhadap korpus data yang terdiri atas dokumen ceramah, arsip dakwah, tulisan-tulisan mengenai pemikiran K.H. Abdullah Syafi'ie, serta wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dakwah beliau. Berdasarkan proses pengkodean tematik dan analisis framing model Entman (1993), ditemukan tiga bingkai utama yang secara konsisten muncul dalam pesan-pesan kebangsaan yang disampaikan, yaitu kebangsaan sebagai amanah keagamaan, kebangsaan sebagai kebutuhan sosial, dan kebangsaan sebagai warisan sejarah perjuangan. Ketiga bingkai tersebut diidentifikasi

melalui frekuensi kemunculan tema, intensitas penekanan pesan, serta konsistensinya pada berbagai sumber data yang diteliti.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bingkai kebangsaan sebagai amanah keagamaan merupakan bingkai yang paling dominan. Tema ini muncul secara berulang dalam berbagai ceramah dan narasi dakwah yang menekankan hubungan antara tanggung jawab keagamaan dan kewajiban menjaga persatuan bangsa. Dalam struktur framing Entman, bangsa dan negara didefinisikan sebagai amanah yang harus dijaga (*define problem*), perpecahan diposisikan sebagai ancaman terhadap kemaslahatan umat (*diagnose causes*), persatuan dipandang sebagai kewajiban moral dan keagamaan (*moral judgment*), sedangkan partisipasi sosial dan penguatan ukhuwah menjadi solusi yang ditawarkan (*treatment recommendation*). Dominasi bingkai ini menunjukkan bahwa legitimasi religius menjadi sumber utama dalam konstruksi pesan kebangsaan K.H. Abdullah Syafi'ie.

Bingkai kedua adalah kebangsaan sebagai kebutuhan sosial. Bingkai ini ditemukan terutama dalam pesan-pesan yang menekankan pentingnya harmoni sosial, solidaritas masyarakat, dan kerja sama antarwarga. Dibandingkan bingkai religius, frekuensi kemunculannya lebih rendah, tetapi memiliki fungsi penting sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam bingkai ini, persatuan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai kebutuhan praktis untuk menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan harmonis.

Sementara itu, bingkai kebangsaan sebagai warisan sejarah perjuangan muncul terutama dalam narasi yang merujuk pada perjuangan ulama dan tokoh bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, dibandingkan dua bingkai sebelumnya, intensitas kemunculan tema historis relatif lebih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi utama bingkai historis bukan sebagai kerangka dominan, melainkan sebagai penguat legitimasi moral terhadap pentingnya menjaga persatuan bangsa.

Berdasarkan frekuensi kemunculan dan intensitas pesan dalam data, dapat disusun hierarki framing sebagai berikut: (1) kebangsaan sebagai amanah keagamaan; (2) kebangsaan sebagai kebutuhan sosial; dan (3) kebangsaan sebagai warisan sejarah perjuangan. Hierarki ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie lebih banyak bertumpu pada legitimasi nilai-nilai Islam dibandingkan argumentasi sosial maupun historis. Dengan demikian, efektivitas pesan kebangsaan

yang dibangun tidak semata-mata berasal dari argumentasi rasional, tetapi terutama dari otoritas moral dan religius yang melekat pada dakwah.

Penelitian ini juga menemukan adanya bentuk counter-framing yang berkembang dalam konteks sosial-politik pada masa tersebut. Beberapa narasi keagamaan cenderung memisahkan identitas keislaman dari identitas kebangsaan atau memandang nasionalisme sebagai konsep yang berasal dari luar tradisi Islam. Terhadap narasi tersebut, K.H. Abdullah Syafi'ie membangun framing alternatif dengan menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan sejalan dengan prinsip amanah, ukhuwah, dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, nasionalisme tidak diposisikan sebagai identitas yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab keislaman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Analisis framing dalam penelitian ini dilakukan terhadap data berupa transkrip ceramah, arsip dakwah, dokumentasi lembaga pendidikan, serta wawancara dengan informan yang memiliki kedekatan historis dengan K.H. Abdullah Syafi'ie. Berdasarkan proses coding terbuka dan axial coding, ditemukan tiga bingkai utama yang digunakan dalam konstruksi pesan kebangsaan, yaitu kebangsaan sebagai amanah keagamaan, kebangsaan sebagai kebutuhan sosial, dan kebangsaan sebagai warisan sejarah perjuangan. Distribusi temuan masing-masing bingkai dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Hasil Coding Bingkai Kebangsaan

No	Jenis Bingkai	Jumlah Unit Data	Sumber Dominan
1	Amanah Keagamaan	42	Ceramah & arsip dakwah
2	Kebutuhan Sosial	28	Ceramah & wawancara informan
3	Warisan Sejarah Perjuangan	15	Arsip & dokumentasi biografis

Berdasarkan tabel tersebut, bingkai kebangsaan sebagai amanah keagamaan merupakan bingkai yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi religius menjadi fondasi utama dalam konstruksi pesan kebangsaan K.H. Abdullah Syafi'ie. Dalam salah satu ceramahnya, beliau menegaskan: "Menjaga persatuan bangsa adalah bagian dari amanah Allah kepada umat Islam, karena perpecahan adalah

kerusakan yang harus dihindari.” (*Sumber: Ceramah K.H. Abdullah Syafi’ie, arsip dakwah, (1980)*)

Dalam bingkai ini, bangsa diposisikan sebagai amanah yang harus dijaga, sementara perpecahan dipandang sebagai ancaman moral dan sosial. Dengan demikian, kebangsaan tidak dipahami sebagai konsep politik semata, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Bingkai kedua, yaitu kebangsaan sebagai kebutuhan sosial, muncul dalam konteks penekanan pentingnya stabilitas dan harmoni sosial. Dalam wawancara dengan K.H. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie, beliau menyatakan: “Pesan ayah kami selalu menekankan bahwa hidup rukun di antara sesama warga adalah bagian dari ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa.” (*Wawancara, K.H. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie, (12 April 2026)*)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebangsaan tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga secara fungsional sebagai kebutuhan untuk menjaga keteraturan sosial.

Bingkai ketiga, yaitu kebangsaan sebagai warisan sejarah perjuangan, ditemukan dalam narasi yang merujuk pada jasa para pendahulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam salah satu dokumentasi dakwah disebutkan: “Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para ulama dan pejuang bangsa, maka wajib bagi kita menjaganya dengan sebaik-baiknya.” (*Hasil Cuplikan Rekaman Ceramah*)

Namun, dibandingkan dua bingkai lainnya, bingkai historis memiliki intensitas yang lebih rendah, sehingga berfungsi sebagai penguat legitimasi moral, bukan sebagai kerangka utama. Berdasarkan distribusi tersebut, dapat disusun hierarki framing, di mana bingkai religius menjadi dominan, diikuti bingkai sosial, dan terakhir bingkai historis. Dominasi bingkai religius menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi’ie bertumpu pada otoritas moral keagamaan dalam membentuk kesadaran kebangsaan.

Dari perspektif teori framing, Chong & Druckman (2013) menjelaskan bahwa efektivitas framing ditentukan oleh kompetisi antarframe serta kekuatan sumber legitimasi yang mendukungnya. Dalam konteks ini, dominasi bingkai religius menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan lebih kuat dibandingkan narasi sosial maupun historis dalam mempengaruhi persepsi audiens.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya proses penguatan frame melalui interaksi antara teks dakwah dan interpretasi audiens. Hal ini mengindikasikan bahwa framing tidak hanya bekerja pada level produksi pesan, tetapi juga pada level resepsi sosial yang memperkuat internalisasi nilai kebangsaan dalam masyarakat.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa framing yang dibangun K.H. Abdullah Syafi'ie umumnya diterima oleh audiens sebagaimana yang dimaksudkan oleh komunikator. Informan memaknai pesan-pesan kebangsaan sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam dan bukan sebagai wacana politik yang terpisah dari agama. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara *frame building* yang dilakukan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie dan *frame reception* yang berkembang di kalangan audiens. Kesesuaian tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa dakwah beliau mampu membentuk kesadaran kebangsaan yang relatif kuat dan bertahan dalam memori sosial para pengikutnya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi politik K.H. Abdullah Syafi'ie tidak hanya terletak pada kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai lapisan makna religius, sosial, dan historis ke dalam satu narasi kebangsaan yang koheren. Kontribusi utama penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah kultural dapat berfungsi sebagai mekanisme framing politik yang efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan melalui legitimasi nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

### **3. Pendekatan Kultural dalam Efektivitas Komunikasi**

Pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi politik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie sangat dipengaruhi oleh pendekatan kultural yang digunakan dalam penyampaian pesan kebangsaan. Berdasarkan hasil analisis data berupa ceramah, dokumentasi dakwah, dan wawancara dengan informan, ditemukan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh substansi pesan, tetapi juga oleh cara pesan dikemas melalui bahasa lokal, simbol budaya, dan konteks sosial yang akrab dengan audiens. Pendekatan ini menciptakan kedekatan sosial yang memperkuat penerimaan pesan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Betawi berfungsi sebagai medium penting dalam membangun kedekatan emosional antara komunikator dan audiens. Dalam wawancara dengan informan (murid dan jamaah yang mengikuti pengajian), ditemukan bahwa penggunaan bahasa lokal membuat

pesan lebih mudah dipahami dan terasa dekat secara kultural. Salah satu informan menyatakan:

“Kalau beliau ngomong pakai logat Betawi, pesannya jadi lebih nyampe, nggak terasa menggurui, malah seperti nasihat dari orang tua sendiri.” (*Wawancara, Informan 1, [1 April 2026]*)

Informan lain menambahkan:

“Bahasa yang dipakai itu bikin kita merasa bagian dari pesan itu, bukan orang luar.” (*Wawancara, Informan 2, [1 April 2026]*)

Data ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dalam konteks penelitian ini tidak hanya bersifat asuntif, tetapi juga terkonfirmasi melalui pengalaman audiens yang merasakan kedekatan emosional dan penerimaan pesan melalui bahasa lokal.

Dalam perspektif teori komunikasi budaya, penggunaan bahasa lokal dapat mengurangi jarak sosial antara komunikator dan komunikan (Samovar, Porter, McDaniel, & Roy, 2017). Temuan empiris penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan konsep tersebut, di mana bahasa Betawi berfungsi sebagai medium yang memperkuat identifikasi audiens terhadap pesan kebangsaan yang disampaikan. Dengan demikian, audience-centered communication (Littlejohn & Foss, 2017) tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga terbukti dalam praktik, karena audiens secara aktif mengaitkan pesan kebangsaan dengan pengalaman budaya mereka sendiri, bukan sebagai pesan eksternal yang asing.

Selain bahasa, simbol budaya juga menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi. Nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas sosial digunakan sebagai representasi kebangsaan yang dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Geertz (1973/2017), simbol budaya berfungsi sebagai “model of” realitas (representasi kehidupan sosial) sekaligus “model for” realitas (pedoman tindakan sosial). Dalam konteks ini, simbol budaya yang digunakan dalam dakwah K.H. Abdullah Syafi’ie tidak hanya merepresentasikan kehidupan masyarakat, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami dan mempraktikkan nilai kebangsaan.

Lebih lanjut, pendekatan kontekstual ditemukan melalui penyesuaian pesan dengan situasi sosial audiens, seperti konflik sosial, tantangan ekonomi, dan dinamika antar kelompok. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual masyarakat sehingga pesan menjadi lebih relevan.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa audiens merasakan pesan lebih “mengena” karena berkaitan langsung dengan realitas kehidupan mereka.

Dalam konteks ini, konsep audience-centered communication (Littlejohn & Foss, 2017) tercermin dalam praktik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie, di mana pesan kebangsaan tidak disampaikan secara satu arah, tetapi disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan audiens. Dengan kata lain, audiens tidak diposisikan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai subjek yang turut membentuk makna pesan melalui pengalaman sosial mereka.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan pendekatan kultural. Pertama, efektivitas penggunaan bahasa Betawi dan simbol budaya lokal cenderung lebih kuat pada komunitas yang memiliki kedekatan kultural dengan budaya Betawi. Pada komunitas non-Betawi, seperti pendatang atau kelompok dengan latar budaya berbeda, kedekatan emosional yang terbentuk tidak selalu sama kuatnya. Kedua, dalam konteks era digital, pendekatan berbasis budaya lokal menghadapi tantangan dalam hal jangkauan, karena komunikasi digital cenderung bersifat lintas budaya dan cepat berubah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural memiliki batas kontekstual yang perlu diperhatikan dalam pengembangan strategi komunikasi kontemporer.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural berperan penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi politik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie, terutama melalui penggunaan bahasa lokal, simbol budaya, dan penyesuaian konteks sosial. Namun, efektivitas tersebut bersifat kontekstual dan tidak universal, sehingga perlu adaptasi ketika diterapkan pada masyarakat yang lebih beragam secara budaya maupun dalam ruang komunikasi digital modern.

Selain bahasa, simbol budaya juga menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi yang digunakan. Simbol-simbol seperti tradisi lokal, nilai kekeluargaan, serta praktik sosial sehari-hari digunakan sebagai medium untuk menyampaikan pesan kebangsaan secara implisit. Dalam hal ini, kebangsaan tidak disampaikan sebagai konsep abstrak, tetapi dihadirkan dalam bentuk pengalaman konkret yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, nilai gotong royong dan solidaritas sosial dijadikan sebagai representasi dari semangat kebangsaan yang harus dijaga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Geertz (2017) yang menekankan bahwa simbol budaya memiliki fungsi sebagai “model of” dan “model for” realitas, yaitu sebagai representasi sekaligus pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam kajian

komunikasi kontemporer, Waisbord (2018) juga menegaskan bahwa komunikasi yang efektif harus mampu mengaitkan pesan dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penggunaan simbol budaya dalam dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie dapat dipahami sebagai strategi untuk mengontekstualisasikan pesan kebangsaan agar lebih relevan dan bermakna.

Lebih lanjut, pendekatan kontekstual menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, K.H. Abdullah Syafi'ie selalu menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan situasi dan kondisi audiens. Pesan kebangsaan tidak disampaikan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat, seperti konflik sosial, perbedaan kelompok, atau tantangan ekonomi. Pendekatan ini membuat pesan yang disampaikan terasa lebih relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan audiens.

Dalam teori komunikasi, pendekatan kontekstual ini dikenal sebagai audience-centered communication, yaitu strategi yang menempatkan audiens sebagai pusat dalam proses komunikasi (Littlejohn & Foss, 2017). Penelitian oleh Nasrullah (2018) juga menunjukkan bahwa komunikasi yang mempertimbangkan konteks sosial audiens memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi yang bersifat umum dan tidak kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie sejalan dengan prinsip-prinsip komunikasi modern yang menekankan pentingnya relevansi pesan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan kultural tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga memperkuat dimensi afektif dalam penerimaan pesan. Masyarakat tidak hanya memahami pesan kebangsaan secara rasional, tetapi juga merasakannya sebagai bagian dari identitas mereka. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan emosional yang tinggi dalam kegiatan dakwah dan sosial yang berkaitan dengan pesan kebangsaan. Keterlibatan ini menjadi indikator bahwa komunikasi yang dilakukan berhasil membangun kesadaran kolektif yang kuat.

Penelitian oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa komunikasi berbasis budaya memiliki kemampuan untuk membangun keterikatan emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan komunikasi yang bersifat formal. Selain itu, studi oleh Wibowo (2019) dalam konteks komunikasi lokal di Indonesia menemukan bahwa pendekatan kultural mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa pendekatan kultural merupakan faktor kunci dalam efektivitas komunikasi politik dakwah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan kultural menghadapi tantangan dalam era digital. Perubahan pola komunikasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, menyebabkan terjadinya pergeseran dalam preferensi bahasa dan simbol yang digunakan. Media digital cenderung menghadirkan budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Dalam situasi ini, pendekatan kultural yang bersifat tradisional perlu mengalami adaptasi agar tetap relevan.

Penelitian oleh Lim (2017) menunjukkan bahwa media sosial dapat mengubah pola komunikasi masyarakat dengan menciptakan ruang interaksi yang lebih cepat dan terbuka, tetapi juga rentan terhadap disinformasi. Dalam konteks ini, pendekatan kultural perlu dikombinasikan dengan strategi komunikasi digital agar pesan kebangsaan tetap dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Studi oleh Hidayat dan Anwar (2022) juga menegaskan bahwa integrasi antara komunikasi kultural dan digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan komunikasi di era modern.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural yang digunakan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas komunikasi politik dakwah. Penggunaan bahasa lokal, simbol budaya, dan pendekatan kontekstual mampu memperkuat penerimaan pesan kebangsaan di kalangan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membangun keterikatan emosional dan kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam kajian komunikasi politik dan dakwah, khususnya dalam memahami bagaimana budaya dapat menjadi medium yang efektif dalam menyampaikan pesan kebangsaan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal memiliki potensi besar dalam membangun kohesi sosial di masyarakat yang plural. Oleh karena itu, pendekatan kultural perlu terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan dinamika sosial yang terus berubah.

#### **4. Peran Pendidikan dan Keteladanan sebagai Medium Komunikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan keteladanan merupakan dua medium utama dalam strategi komunikasi politik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie untuk mentransmisikan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung melalui penyampaian pesan verbal, tetapi juga melalui proses institusional pendidikan dan praksis sosial

keteladanan. Dengan demikian, pembentukan kesadaran kebangsaan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diinternalisasi melalui pengalaman belajar dan penghayatan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan, lembaga yang didirikan oleh K.H. Abdullah Syafi'ie, yaitu Perguruan Islam As-Syafi'iyah, menjadi ruang strategis dalam transmisi nilai kebangsaan secara sistematis. Lembaga ini berkembang dalam beberapa jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA). Secara institusional, As-Syafi'iyah berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan kurikulum keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan dan pembentukan karakter sosial, sehingga menjadi ruang produksi sekaligus reproduksi nilai religius dan nasional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa integrasi nilai kebangsaan dalam lingkungan pendidikan berlangsung secara sistematis dan tidak terpisah dari nilai keagamaan. Salah satu guru senior menyatakan:

“Di As-Syafi'iyah itu sejak awal diajarkan bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Jadi anak-anak tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar bagaimana hidup rukun dan bertanggung jawab sebagai warga negara.” (*Wawancara, Informan 1, 2 April 2026*)

Sementara itu, alumni menyampaikan: “Nilai kebersamaan dan disiplin itu tidak hanya diajarkan di kelas, tapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Jadi terasa sekali bahwa sekolah ini membentuk cara kami bersikap di masyarakat.” (*Wawancara, Informan 2, 2 April 2026*)

Temuan ini menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk disposisi sosial melalui praktik berulang dalam kehidupan institusional. Berikut Diagram Model Konseptual :



Gambar 1. Diagram Model Konseptual

Model ini menjelaskan bahwa pembentukan kesadaran kebangsaan dalam komunikasi politik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie berlangsung melalui tiga lapisan proses utama yang saling terhubung secara sirkular: habitus (struktur internal sosial), framing (proses komunikasi simbolik), dan internalisasi kebangsaan (hasil kognitif-afektif-behavioral).

Dalam perspektif teoritis, proses tersebut dapat dijelaskan melalui konsep habitus Pierre Bourdieu, yaitu sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang berulang dan kemudian mengarahkan tindakan individu secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari (Bourdieu, 1977). Dalam konteks As-Syafi'iyah, nilai kebangsaan tidak hanya diajarkan, tetapi diinternalisasi menjadi habitus kolektif peserta didik melalui praktik pendidikan yang berkelanjutan.

Selain itu, mekanisme pembelajaran juga mencerminkan konsep experiential learning yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses internalisasi nilai (Kolb, 2017). Namun, dalam konteks penelitian ini, pengalaman tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional melalui sistem pendidikan yang terstruktur.

Selain pendidikan formal, keteladanan (uswah hasanah) menjadi medium komunikasi yang tidak kalah penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Abdullah Syafi'ie tidak hanya menyampaikan pesan kebangsaan melalui ceramah,

tetapi juga melalui tindakan nyata yang konsisten dengan nilai yang diajarkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan:

“Beliau itu orangnya sederhana, dekat dengan masyarakat, dan selalu hadir di kegiatan sosial. Jadi apa yang beliau sampaikan itu memang beliau lakukan juga.”  
(*Wawancara, Informan 3, 2 April 2026*)

Dalam perspektif teori, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Social Learning Theory dari Bandura (1977), yang menekankan bahwa individu belajar melalui observasi terhadap perilaku model sosial yang dianggap kredibel. Keteladanan K.H. Abdullah Syafi’ie berfungsi sebagai model perilaku yang memperkuat internalisasi nilai kebangsaan di masyarakat. Dari perspektif interaksi simbolik, tindakan sosial tersebut juga memiliki makna komunikasi. Blumer (1969) menjelaskan bahwa makna terbentuk melalui interaksi sosial dan ditafsirkan oleh individu dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, tindakan keteladanan K.H. Abdullah Syafi’ie tidak hanya dipahami sebagai perilaku individual, tetapi sebagai simbol nilai kebangsaan yang hidup dalam praktik sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme habituasi berbasis pendidikan dan keteladanan menghadapi tantangan dalam era modern. Meskipun lingkungan As-Syafi’iyah berhasil membentuk habitus kebangsaan pada generasi sebelumnya, perubahan pola sosial dan digitalisasi informasi menyebabkan proses internalisasi nilai menjadi lebih kompetitif dengan sumber-sumber nilai lain di luar institusi pendidikan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan keteladanan merupakan medium komunikasi yang saling melengkapi. Pendidikan membentuk struktur kognitif dan habitus nilai kebangsaan, sementara keteladanan memperkuat dimensi afektif dan perilaku. Sinergi keduanya menciptakan proses komunikasi yang berkelanjutan dalam pembentukan kesadaran kebangsaan berbasis nilai keislaman dan kultural.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Banks (2017) yang menekankan bahwa pendidikan kewargaan yang efektif harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan identitas dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, studi oleh Sirozi (2017) menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membentuk karakter kebangsaan melalui pendekatan yang berbasis nilai. Selain itu, penelitian oleh Azra (2018) menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam di

Indonesia telah memainkan peran historis dalam membangun kesadaran nasional melalui integrasi antara ajaran agama dan nilai kebangsaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transmisi nilai kebangsaan dalam pendidikan berlangsung melalui mekanisme habituasi. Nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sosial tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti kerja sama antar siswa, kegiatan sosial, dan interaksi dalam lingkungan sekolah. Proses habituasi ini memperkuat internalisasi nilai karena peserta didik mengalami langsung praktik nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Dalam perspektif teori pendidikan, pendekatan ini sejalan dengan konsep *experiential learning* yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung (Kolb, 2017). Penelitian oleh Hidayat (2020) juga menunjukkan bahwa pendidikan berbasis pengalaman memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam membentuk karakter dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pendidikan yang digunakan dalam konteks penelitian ini memiliki landasan teoretis yang kuat.

Selain pendidikan formal, keteladanan (*uswah hasanah*) menjadi medium komunikasi yang tidak kalah penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Abdullah Syafi'ie tidak hanya menyampaikan pesan kebangsaan melalui ceramah, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Konsistensi antara ucapan dan tindakan menciptakan kredibilitas yang tinggi, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Dalam teori komunikasi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *social learning theory* yang dikemukakan oleh Bandura, di mana individu belajar melalui observasi terhadap perilaku orang lain (Bandura, 2018). Penelitian oleh Hosen (2019) juga menunjukkan bahwa keteladanan tokoh agama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat, terutama dalam konteks nilai sosial dan politik. Dengan demikian, keteladanan dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang memiliki daya pengaruh yang kuat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keteladanan memiliki dimensi simbolik yang memperkuat pesan kebangsaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan, seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial, kepedulian terhadap masyarakat, dan sikap inklusif terhadap perbedaan, menjadi simbol konkret dari nilai kebangsaan yang

disampaikan. Simbol-simbol ini berfungsi sebagai representasi nyata dari pesan yang disampaikan, sehingga memperkuat proses internalisasi nilai.

Dalam kajian komunikasi simbolik, tindakan sosial dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang memiliki makna tertentu dalam konteks budaya (Blumer, 2017). Penelitian oleh Rahman (2021) juga menunjukkan bahwa komunikasi berbasis keteladanan memiliki efektivitas yang tinggi karena mampu menjembatani antara nilai normatif dan praktik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keteladanan merupakan medium komunikasi yang tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperkuat komunikasi verbal.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pendidikan dan keteladanan menciptakan proses komunikasi yang berkelanjutan. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan dan nilai, sementara keteladanan memperkuat implementasi nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Sinergi antara keduanya menciptakan sistem komunikasi yang holistik, di mana nilai kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi oleh masyarakat.

Penelitian oleh Wibowo (2019) menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat integratif, yaitu menggabungkan aspek kognitif dan afektif, memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam membentuk kesadaran kolektif. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi pada aspek kognitif, sementara keteladanan berperan pada aspek afektif dan behavioral. Kombinasi ini menjadi kunci dalam membangun kesadaran kebangsaan yang kuat dan berkelanjutan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan efektivitas medium pendidikan dan keteladanan di era digital. Perubahan pola komunikasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sumber belajar dan figur teladan. Media sosial menghadirkan banyak figur publik yang tidak selalu memiliki nilai yang sejalan dengan kebangsaan, sehingga berpotensi memengaruhi proses internalisasi nilai.

Penelitian oleh Lim (2017) menunjukkan bahwa media digital dapat mengubah pola konsumsi informasi dan preferensi masyarakat terhadap figur publik. Dalam konteks ini, peran lembaga pendidikan dan tokoh teladan menjadi semakin penting sebagai penyeimbang terhadap arus informasi yang tidak terkontrol. Studi oleh Hidayat dan Anwar (2022) juga menegaskan bahwa pendidikan perlu beradaptasi dengan perkembangan digital dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan kebangsaan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan keteladanan merupakan medium komunikasi yang sangat efektif dalam mentransmisikan nilai kebangsaan. Pendidikan memberikan fondasi pengetahuan dan nilai, sementara keteladanan memperkuat implementasi nilai tersebut dalam praktik sosial. Kombinasi keduanya menciptakan proses komunikasi yang berkelanjutan dan mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam kajian komunikasi politik dan dakwah, khususnya dalam memahami bagaimana nilai kebangsaan dapat ditransmisikan secara efektif melalui medium pendidikan dan keteladanan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang berbasis pada pengalaman dan praktik nyata memiliki potensi besar dalam membangun kohesi sosial di masyarakat yang plural. Oleh karena itu, penguatan peran pendidikan dan keteladanan menjadi strategi yang relevan dalam menghadapi tantangan kebangsaan di era modern.

## **5. Relevansi dan Tantangan Komunikasi Kebangsaan di Era Digital**

Pembahasan mengenai relevansi dan tantangan komunikasi kebangsaan dalam era digital perlu ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka epistemologis penelitian ini. Kajian ini tidak berangkat dari observasi empiris terhadap praktik komunikasi K.H. Abdullah Syafi'ie dalam konteks digital, mengingat beliau merupakan tokoh historis yang wafat pada tahun 1983, melainkan dari rekonstruksi data historis berupa ceramah, dokumentasi dakwah, serta wawancara dengan informan yang memiliki kedekatan dengan beliau. Oleh karena itu, pembahasan mengenai era digital dalam bagian ini tidak dimaksudkan sebagai temuan empiris, tetapi sebagai diskusi konseptual berbasis literatur untuk menempatkan warisan strategi komunikasi beliau dalam lanskap komunikasi kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kekuatan utama strategi komunikasi K.H. Abdullah Syafi'ie terletak pada basis nilai yang diinternalisasikan melalui integrasi antara dimensi religius, pendekatan kultural, dan keteladanan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang beliau bangun tidak semata-mata bertumpu pada medium, tetapi pada substansi nilai yang bersifat mendasar dan berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang menegaskan bahwa pesan-pesan beliau konsisten menekankan persatuan, tanggung jawab sosial, dan penguatan moral kebangsaan yang disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks historis

penelitian ini, strategi komunikasi beliau dapat dipahami sebagai bentuk value-based communication yang berpusat pada penguatan makna, bukan pada teknologi penyampaian pesan.

Dalam ranah diskusi teoritis, perubahan lanskap komunikasi pada era digital dapat dipahami melalui literatur komunikasi kontemporer yang menunjukkan bahwa media tidak lagi sekadar menjadi saluran informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk cara realitas sosial dikonstruksi. Dalam perspektif mediatization, media digital turut menentukan bagaimana pesan diproduksi, disirkulasikan, dan dimaknai oleh masyarakat (Couldry & Hepp, 2017). Pada titik ini, transformasi komunikasi kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan terfragmentasi. Literatur juga menunjukkan bahwa kondisi ini berpotensi menghasilkan fragmentasi audiens, di mana masyarakat tersegmentasi dalam kelompok-kelompok informasi yang berbeda berdasarkan preferensi mereka (Bennett & Iyengar, 2017).

Lebih jauh, fenomena echo chamber dalam ruang digital dijelaskan dalam kajian Sunstein (2017) sebagai kondisi ketika individu cenderung terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga mempersempit ruang dialog publik. Dalam konteks ini, pesan kebangsaan yang bersifat inklusif dan moderat sering kali menghadapi tantangan dalam bersaing dengan narasi yang lebih emosional dan polarisatif. Namun demikian, seluruh penjelasan mengenai dinamika digital tersebut dalam penelitian ini tidak bersumber dari data lapangan, melainkan merupakan elaborasi teoritis untuk memberikan konteks terhadap relevansi historis strategi komunikasi yang dikaji.

Secara epistemologis, penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini tidak memosisikan K.H. Abdullah Syafi'ie sebagai aktor yang berinteraksi langsung dengan ekosistem komunikasi digital. Oleh karena itu, hubungan antara strategi komunikasi beliau dengan era digital tidak dipahami sebagai bentuk adaptasi empiris, melainkan sebagai refleksi konseptual yang membuka ruang interpretasi mengenai kemungkinan aktualisasi nilai-nilai komunikasi beliau dalam konteks kekinian. Dengan demikian, klaim mengenai relevansi langsung di era digital tidak digunakan sebagai kesimpulan empiris, melainkan sebagai proposisi analitis yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

Dalam batasan tersebut, tantangan komunikasi kebangsaan di era digital seperti meningkatnya disinformasi, rendahnya literasi digital, serta polarisasi opini

publik juga dipahami sebagai bagian dari diskursus literatur, bukan temuan penelitian ini. Literatur menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital dapat memperkuat kerentanan masyarakat terhadap hoaks dan narasi yang menyesatkan, sehingga memengaruhi kualitas ruang publik (Syahputra, 2019; Nugroho, 2020). Namun demikian, seluruh uraian ini berfungsi sebagai konteks analitis untuk memahami perubahan ekologi komunikasi, bukan sebagai hasil verifikasi empiris dalam studi ini.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa warisan strategi komunikasi K.H. Abdullah Syafi'ie memiliki kekuatan utama pada dimensi nilai yang bersifat universal dan lintas konteks. Nilai-nilai seperti persatuan, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial dapat dipahami sebagai prinsip yang secara teoritis memiliki potensi untuk beradaptasi dalam berbagai medium komunikasi, termasuk media digital. Akan tetapi, adaptasi tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai hasil penelitian ini, melainkan sebagai ruang konseptual yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut, khususnya melalui penelitian yang secara empiris menelaah transformasi komunikasi nilai dalam ekosistem digital.

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi komunikasi politik dakwah K.H. Abdullah Syafi'ie membingkai kesadaran kebangsaan, dengan menemukan bahwa konstruksi kebangsaan dalam dakwah beliau bekerja melalui integrasi antara nilai religius, pendekatan kultural, dan keteladanan sebagai satu sistem komunikasi yang saling menguatkan. Kesadaran kebangsaan tidak dibangun sebagai konsep politik yang terpisah dari agama, tetapi sebagai makna sosial-religius yang dilegitimasi melalui bingkai amanah, ukhuwah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, komunikasi kebangsaan dalam konteks ini berfungsi sebagai proses internalisasi nilai yang menghubungkan identitas keagamaan dengan identitas kebangsaan secara simultan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik dan dakwah dengan menunjukkan bahwa framing dalam konteks ulama tidak hanya bekerja pada level seleksi isu sebagaimana dalam literatur komunikasi politik klasik, tetapi juga beroperasi sebagai mekanisme internalisasi nilai melalui institusi pendidikan dan praktik keteladanan. Temuan ini memperluas pemahaman tentang framing dengan mengintegrasikannya ke dalam konteks sosial-

keagamaan, di mana pesan tidak hanya dikonstruksi secara diskursif, tetapi juga diinstitutionalisasi melalui pendidikan dan praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tentang komunikasi politik berbasis nilai (*value-based communication*) dalam konteks masyarakat religius.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan penting. Pertama, data penelitian sangat bergantung pada sumber historis berupa dokumentasi dan wawancara dengan informan sekunder, sehingga tidak memungkinkan verifikasi langsung terhadap seluruh praktik komunikasi K.H. Abdullah Syafi'ie. Kedua, penelitian ini belum menguji secara empiris bagaimana warisan strategi komunikasi tersebut diadaptasi dalam konteks komunikasi digital kontemporer, sehingga dimensi digital masih berada pada level analisis konseptual. Ketiga, keterbatasan jumlah dan variasi informan juga membatasi kedalaman triangulasi data, khususnya dalam memetakan variasi resepsi audiens secara lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini tidak bermaksud memberikan generalisasi, melainkan menawarkan model analitis tentang hubungan antara framing, nilai keagamaan, dan pembentukan kesadaran kebangsaan dalam konteks dakwah. Oleh karena itu, temuan ini bersifat kontekstual dan historis, bukan universal.

Sebagai implikasi yang lebih terukur, penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lanjutan yang secara empiris menguji transformasi model komunikasi berbasis nilai ini dalam ruang pendidikan dan dakwah kontemporer, khususnya pada institusi pendidikan Islam yang memiliki kesinambungan historis dengan model As-Syafi'iyah. Selain itu, diperlukan penelitian komparatif yang mengukur perbedaan efektivitas antara komunikasi berbasis keteladanan tradisional dan komunikasi berbasis media digital dalam pembentukan kesadaran kebangsaan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi utamanya terletak pada pengembangan model konseptual komunikasi politik dakwah berbasis framing nilai yang menghubungkan struktur sosial (*habitus*), proses komunikasi (*framing*), dan hasil internalisasi nilai (*kesadaran kebangsaan*) dalam satu kerangka analitis yang terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abda, Y. (2021). Komunikasi politik ulama dayah tradisional Aceh. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(1), 78–100.
- Al-Attas, S. M. N. (2014). *Islam and secularism*. ISTAC.
- Al-Bayanuni, M. A. (2013). *Al-madkhal ila 'ilm al-da'wah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali, M. (2011). *Fiqh al-sirah*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-jihad*. Maktabah Wahbah.
- Al-Saggaf, Y. (2017). *Social media in the Arab world*. Palgrave Macmillan.
- Arifin, Z. (2018). Dakwah kultural dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Dakwah*, 19(2).
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2017). *Islam Indonesia: Kontribusi pada peradaban global*. Mizan.
- Azra, A. (2018). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenial*. Kencana.
- Banks, J. A. (2017). *Citizenship education and global migration*. Routledge.
- Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2010). The shifting foundations of political communication: Responding to a defense of the media effects paradigm. *Journal of Communication*, 60(1), 35–39.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Prentice-Hall.
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2013). Counterframing effects. *Journal of Politics*, 75(1), 1–16.
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2017). Framing theory. *Annual Review of Political Science*, 20, 103–126.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Hasan, N. (2018). Salafism in Indonesia: Transnational Islam, violent activism, and cultural resistance. *ISEAS Publishing*.
- Hassan, A. (1984). *Islam dan kebangsaan*. Bandung: Persis Press.
- Natsir, M. (2008). *Fiqhud dakwah*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Qutb, S. (2001). *Fiqh dakwah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sirodj, S. A. (2015). *Islam kebangsaan: Fiqh demokrasi kaum santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.

- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Heryanto, A. (2018). *Identity and pleasure: The politics of Indonesian screen culture*. NUS Press.
- Hidayat, A. (2019). Peran ulama dalam komunikasi sosial masyarakat. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(1).
- Hidayat, A. (2020). Pendidikan karakter berbasis pengalaman dalam pembelajaran Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 123–138.
- Hidayat, A., & Anwar, K. (2022). Transformasi pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 45–60.
- Hjarvard, S. (2016). Mediatization and the changing authority of religion. *Media, Culture & Society*, 38(1), 8–17.
- Hosen, N. (2019). Religion and the Indonesian constitution: A recent debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2), 247–265.
- Karim, S., & Alamsyah, A. (2018). Analisis framing pemberitaan Islam dan politik. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 198–233.
- Kersten, C. (2015). *Islam in Indonesia: The contest for society, ideas and values*. Hurst.
- Kolb, D. A. (2017). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Pearson.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif*. Prenadamedia Group.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- Menchik, J. (2019). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.

- Rahman, F. (2021). Komunikasi budaya dalam dakwah Islam kontemporer. *Jurnal Dakwah*, 22(1), 1–15.
- Rahman, F. (2021). Religious framing in political communication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 1–15.
- Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S. (2017). *Communication between cultures* (9th ed.). Cengage Learning.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2017). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication*, 67(3), 340–360.
- Sirozi, M. (2017). Pendidikan Islam dan pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–15.
- Sururi, Z. (2019). Analisis framing media online dalam polemik Islam Nusantara. *Kalijaga Journal of Communication*.
- Waisbord, S. (2018). *The communication manifesto*. Polity Press.
- Wibowo, A. (2019). Pendekatan kultural dalam komunikasi politik lokal. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(1), 55–70.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage.
- Zulham, Z., et al. (2024). Analisis framing media dalam berita kontroversial. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).